

**PENERAPAN PASAL 29 AYAT 1 PERDA NO. 24 TAHUN 2012 TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN
PASURUAN**

(Studi Di Dinas Penanaman Modal Dam Pelayanan Terpadu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mempersiapkan Tugas Akhir Skripsi dan memenuhi syarat-syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang



Disusun oleh:

BENARDICTUS OCTO CAESARIANO 135010101111147

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2018

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PASAL 29 AYAT 1 PERDA NO. 24 TAHUN 2012
 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI KABUPATEN PASURUAN
 (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu)**

Oleh :

Benardictus Octo Caesariano
135010101111147

Skripsi ini Telah Disahkan Oleh Majelis Pengaji Pada Tanggal : **124 JAN 2018**

Pembimbing Utama



Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 195907171986011001

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP. 196008101986011002

Mengetahui,

**Ketua Bagian
 Hukum Administrasi Negara**



Lutfi Effendi, S.H., MHum.
NIP. 196008101986011002

**Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Brawijaya**




Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “PENERAPAN PASAL 29 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PASURUAN (Studi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu)”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih atas semua bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayah Ibu dan Adik tersayang atas kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti, khususnya selama penulis menyelesaikan kuliah.
2. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Lutfi Effendi, S.H., Mhum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Basmi, Spd.,MM Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan survey penelitian, dan Bapak Handoyo Gesang, S.T selaku Pelaksana Seksi Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu yang telah menyempatkan diri untuk meluangkan

waktunya dalam memberikan semua informasi dan bantuannya selama melakukan penelitian ini.

7. Serta orang paling spesial, teman teman yang sangat saya sayangi dan banyak pendukung lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhiri ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajianya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Malang, January 2018

Penulis,

Benardictus Octo Caesariano

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Umum Tentang Penerapan Perizinan.....	14
B. Kajian Umum Tentang Perizinan Mendirikan Bangunan Menara.....	19
C. Kajian Umum Tentang Sanksi Administrasi IMBM.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	34
D. Jenis Dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Populasi Dan Sampel.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Definisi Operasional.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	55
C. Penerapan Pasal 29 ayat 1 PERDA Nomer 24 tahun 2012 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki IMBM Di Kabupaten Pasuruan.....	65
D. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja serta Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam menangani perizinan	

menara telekomunikasi bagi pelaku usaha agar bersedia menerima sanksi.....	92
<u>BAB V PENUTUP.....</u>	<u>96</u>
<u>A.</u> Kesimpulan.....	96
<u>B.</u> Solusi.....	97
<u>C.</u> Saran.....	98
<u>DAFTAR PUSTAKA.....</u>	<u>99</u>

DAFTAR TABEL

Tabel Faktor Penyebab/Hambatan tidak memiliki IMBM telekomunikasi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasuruan.....	75
Tabel Daftar Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki IMBM Di Kabupaten Pasuruan.....	79
Tabel 1. Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki IMBM tahun 2015 di Kabupaten Pasuruan.....	81
Tabel 2. Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki IMBM tahun 2016 di Kabupaten Pasuruan.....	83
Tabel 3. Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki IMBM tahun 2017 (s/d bulan october) di kabupaten pasuruan.....	88

**PENERAPAN PASAL 29 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMER 24
TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PASURUAN**

(Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu)

Benardictus Octo Caesariano, Lutfi Effendi, Agus Yulianto

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: benardictusoct@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Pasuruan. Di dalam Pasal tersebut mengamanatkan tentang pembangunan menara memiliki IMBM dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MTB. Di dalam rumusan masalah menjelaskan : (1) apa penerapan dari pasal 29 ayat 1 PERDA No. 24 Tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi kabupaten pasuruan? (2) faktor yang menghambat dari pasal 29 ayat 1 PERDA No. 24 Tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten pasuruan? Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris, yuridis sosiologis pendekatan penelitian. Jawaban dari rumusan masalah (1) pelaku usaha lebih memperlihatkan insfrakstruktur menara. (2) Hambatan dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penertiban dengan penyegelan,penyitaan dan pembongkaran terhadap menara telekomunikasi yang belum memiliki IMBM.

Kata Kunci: **Penerapan Hukum, Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur**

**THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 29 PARAGRAPH (1) OF THE
LOCAL REGULATION NUMBER 24 YEAR 2012 ON
*PLANNING AND CONTROL OF TELECOMMUNICATION
TOWER IN PASURUAN REGENCY***

(A Study in *Department of Investment and Integrated Services*)

Benardictus Octo Caesariano, Lutfi Effendi, Agus Yulianto

Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Email: benardictusoct@gmail.com

ABSTRACT

This research analyses about the implementation of Article 29 paragraph (1) of the Local Regulation Number 24 Year 2012 on Planning and Control of *Telecommunication Tower* in Pasuruan Regency. This article regulates about the tower building should have *Telecommunication Tower Building Permit (IMBMT)* from Regent or designated public officials after get recommendation from the Team to Facilitate the Supervision and Control of the Construction of *Telecommunication Towers (TP3MTB)*. In the research problem, it explains: (1) what is the implementation of Article 29 paragraph (1) of the Local Regulation Number 24 Year 2012 on Planning and Control of *Telecommunication Tower* in Pasuruan Regency? (2) what are factors that hamper the implementation of Article 29 paragraph (1) of Local Regulation Number 24 Year 2012 on Planning and Control of *the Telecommunication Tower* in Pasuruan Regency? This research uses empirical research method and sociological jurisprudence research approach. The answer of the research problems are: (1) businessmen focus to show tower infrastructures; (2) the obstacles from human resources, especially *Pamong Praja Police* Unit that keep in order through seal, *confiscation, and demolition of telecommunication towers which do not have IMBMT*.

Keywords: legal implementation, local regulation, *Pamong Praja Police* Unit, *Department of Investment and Integrated Services* of Pasuruan Regency, East Java

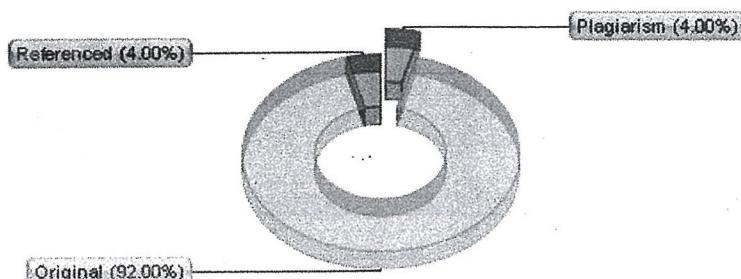
Plagiarism Detector v. 1041 - Originality Report:

Analyzed document: 03/01/2018 13:46:12

"BENARDICTUS OCTO Skripsi.docx"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 4	wrds: 598	http://repository.unpas.ac.id/1316/5/BAB%20I.pdf
% 3	wrds: 377	https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik
% 2	wrds: 264	http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/download/718/603

Show other Sources:]

Processed resources details:

40 - Ok / 4 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

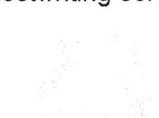
Wikipedia:



Google Books:



Ghostwriting services:



Anti-cheating:



Wiki Detected!

GoogleBooks Detected!

[not detected]

[not detected]

ExcludedUrls:

IncludedUrls:

Detailed document analysis: